



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

### DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 <b>Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser .....</b>	<b>1</b>
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA <b>Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron .....</b>	<b>19</b>
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 <b>Al Araf Assadallah Marzuki .....</b>	<b>33</b>
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH <b>Nyimas Latifah Letty Aziz.....</b>	<b>47</b>
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA <b>Melpayanty Sinaga.....</b>	<b>61</b>
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS <b>Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....</b>	<b>76</b>
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA <b>Djuneidi.....</b>	<b>93</b>
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA <b>Meilinda Sari Yatusman .....</b>	<b>106</b>
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET <b>Ubaidillah.....</b>	<b>113</b>



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

### DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 <b>Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser .....</b>	<b>1</b>
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA <b>Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron .....</b>	<b>19</b>
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 <b>Al Araf Assadallah Marzuki .....</b>	<b>33</b>
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH <b>Nyimas Latifah Letty Aziz.....</b>	<b>47</b>
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA <b>Melpayanty Sinaga.....</b>	<b>61</b>
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS <b>Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana .....</b>	<b>76</b>
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA <b>Djuneidi.....</b>	<b>93</b>
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA <b>Meilinda Sari Yayasanman .....</b>	<b>106</b>
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET <b>Ubaidillah.....</b>	<b>113</b>



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

---

**DDC: 320.5****Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

### **PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969**

**ABSTRAK**

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

*Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua*

---

**DDC: 322.4****Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

### **AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA**

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

*Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog*

---

**DDC: 302.2**

**Al Araf Assadallah Marzuki**

## **PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019**

### **ABSTRAK**

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

*Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber*

---

**DDC: 320.8**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

## **MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

### **ABSTRAK**

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

*Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah*

---

**DDC: 364.1**

**Melpayanty Sinaga**

## **KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

**Kata Kunci:** barter, kejahatan transnasional, perbatasan

---

**DDC: 303.4**

**Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana**

## **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS**

### **ABSTRAK**

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

**Kata kunci:** keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

---

**DDC: 320.5**

**Djuneidi**

## **MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA**

### **ABSTRAK**

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

**Kata Kunci:** Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

---

**Meilinda Sari Yayusman**

**TINJAUAN BUKU**

**PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA**

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

---

**Ubaidillah**

**TINJAUAN BUKU**

**PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET**

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

---

**DDC: 320.5****Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

*Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?*

**Keywords:** *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

---

**DDC: 322.4****Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

*The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.*

**Keywords:** *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

---

**DDC: 302.2**

**Al Araf Assadallah Marzuki**

## **STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION**

### **ABSTRACT**

*In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.*

**Keywords:** *democracy, cyber law, cyber democracy*

---

**DDC: 320.8**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

## **BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE**

### **ABSTRACT**

*This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.*

**Keywords:** *decentralization, national identity, regional autonomy*

---

**DDC: 364.1**

**Melpayanty Sinaga**

## **TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA**

### **ABSTRACT**

*This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation*

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

**Keywords:** barter, transnational crime, border

---

**DDC: 303.4**

**Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana**

## **INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE**

### **ABSTRACT**

*All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.*

**Keywords:** human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

---

**DDC: 320.5**

**Djuneidi**

## **MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION**

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.*

**Keywords:** Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

---

**Meilinda Sari Yayusman**

**TINJAUAN BUKU**

## **PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA**

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

---

**Ubaidillah**

**TINJAUAN BUKU**

**PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET**

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

# PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

*Universitas Cenderawasih*

*E-mail: bercimeterai@yahoo.co.id*

## **ABSTRACT**

*Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Tri Komando) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?*

**Keywords:** *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

## **ABSTRAK**

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963-1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969.

**Kata Kunci:** *perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua*

## **PENDAHULUAN**

Generalisasi tentang nasionalisme Indonesia yang selama ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, tidak dapat dipertahankan. Bahkan, sangatlah berbahaya apabila melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama dari satu daerah ke daerah lain di setiap wilayah di Indonesia. Perjalanan sejarah di Papua mempunyai proses penyemaian, pertumbuhan, dan perkembangan nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan

daerah Indonesia lainnya. Pemahaman akan hal ini sangat penting karena selama ini terjadi kekeliruan dalam memaknai kesadaran nasionalisme di Papua.

Konsep “negara-bangsa” yang dipromosikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sebagai bangsa bukanlah semata-mata didasarkan atas kesamaan etnis, budaya, agama dan memiliki pengalaman serta keinginan yang sama melainkan negara-bangsa ini dibangun atas proyek politik.

Papua pada masa itu masih di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda sejak 1828 hingga 1962. Ketika berlangsungnya peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, Papua belum resmi menjadi bagian dari NKRI hingga 1969.

Namun dewasa ini, ketika konflik terjadi dan sering diwarnai dengan demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Kejora dan bukan bendera Merah Putih di wilayah-wilayah lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan Jakarta, keindonesiaan orang Papua dipertanyakan dan diragukan. Yang menarik pula dari aksi demonstrasi yang terjadi adalah masyarakat yang terlibat demonstrasi yang menuntut referendum dan Papua merdeka bukanlah hanya masyarakat pantai utara, barat dan selatan seperti Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari dan Merauke. Melainkan masyarakat dari daerah pegunungan tengah Papua, seperti Paniai dan Jayawijaya yang baru mendapat sentuhan pengaruh luar pada awal dan akhir abad dua puluh. Masyarakat pegunungan tengah Papua ini semakin agresif dalam mempertahankan pandangannya. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan berbagai konflik yang terjadi di Papua sejak integrasi 1963 hingga pra-kongres rakyat Papua 2000 yang lebih banyak didominasi oleh kelompok elit dan masyarakat dari daerah pantai utara, barat, dan selatan Papua yang lebih awal melakukan kontak dengan pengaruh luar sejak abad ke-16 dan 17.

Menurut Hutubessy dan Engel (2019: 80), berbagai aksi yang terjadi menentang Pemerintah Indonesia cenderung digerakkan oleh mahasiswa di berbagai kota, khususnya di Yogyakarta. Situasi problematik Papua pasca-integrasi dengan Republik Indonesia telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Bahkan, kajian ini menyatakan bahwa penyebab aksi gerakan mahasiswa Papua tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang meliputi nasionalisme yang berbeda, kekerasan yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua, serta ketimpangan sosial pasca-integrasi dengan Indonesia.

Pernyataan Hutubessy dan Engel itu menunjukkan bahwa masalah nasionalisme di Papua merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam mencari penyebab konflik

di Papua. Ironisnya, pemerintah pusat mempunyai pemahaman yang keliru terhadap perjalanan sejarah orang Papua pada masa lalu, khususnya menyangkut perjalanan nasionalisme Indonesia di Papua. Selama ini, ketika mengatasi konflik di Papua, masalah nasionalisme di Papua selalu diabaikan oleh berbagai pihak. Padahal, menurut Widjojo dkk (2009: 8), salah satu sumber konflik di Papua justru disebabkan oleh perbedaan tajam dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Bahkan, Chauvel (2005: 1) menegaskan bahwa sebenarnya nasionalisme Papua yang muncul dewasa ini lebih kuat daripada yang terjadi pada 1961 ketika bendera Bintang Kejora pertama kali dinaikkan.

Selama ini pemerintah melihat penyebab konflik di Papua cenderung dari aspek pembangunan, khususnya ekonomi. Menurut Surpiyono (2014), Pemerintah Indonesia sejak integrasi 1963 telah membudayakan nasionalisme Indonesia di Papua melalui kehadiran pembangunan. Begitu pun dengan pendapat Kapolri Tito Karnavian pada tanggal 28 Agustus 2018 di Rupatan Mabes Polri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa persoalan Papua itu hanya masalah ekonomi, Papua membutuhkan pembangunan, terutama di daerah pegunungan (Masalah Papua, 2018).

Namun, pemikiran Tito di atas ini ditolak oleh Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo yang mengatakan bahwa: Jenderal Tito mungkin sudah lupa bahwa masalah dan konflik di Papua tidak hanya bersumber dari persoalan ekonomi. LIPI dalam bukunya *Papua Road Map* menegaskan bahwa masalah Papua disebabkan oleh empat faktor, yaitu berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua asli, serta dekonstruksi identitas sejarah dan politik masyarakat asli Papua (Masalah Papua, 2018).

Meteray (2012: xi) juga menolak anggapan sementara orang bahwa konflik di Papua dewasa ini semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi. Sejak 1963, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan, baik ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Djopari (1993:154–163) menegaskan bahwa pendekatan militer dan kesejahteraan telah dilakukan sejak awal integrasi 1963–1984 dalam bentuk intensitas yang berbeda.

Oleh karena itu, Meteray (2012:276, 2014:7) berpendapat bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejak integrasi 1963 hingga dewasa ini tidak dapat menjawab berbagai permasalahan, bahkan konflik di Papua terus meningkat. Hal ini terbukti sejak integrasi 1963 di Papua hingga dewasa ini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang belum nasionalis, termasuk daerah pedalaman, sebagai daerah sasaran operasi militer. Padahal, lebih lanjut Meteray (2012:55) menyatakan bahwa keinginan orang Papua menjadi bagian dari Indonesia sebenarnya bukan keinginan dari orang Papua sendiri. Bibit keindonesiaan baru disemai di Papua ketika kemenangan sekutu pada 1944 di Jayapura. Kehadiran sekutu membuka lembaran baru bagi elit Papua untuk mulai mengenal keindonesiaan melalui Soegoro Atmoprasodjo dalam kursus Pamong Praja pada 1945.

Dengan demikian, pertemuan para elite Papua di Jayapura merupakan awal orang Papua termasuk Biak mengenal nasionalisme Indonesia. Namun, pertemuan elite Papua dengan tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soegoro, tidak mampu memperkuat nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua, baik di Jayapura maupun di Biak. Bahkan, pada akhir 1961 nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Apakah lemahnya keindonesiaan di antara orang Papua, termasuk Biak di akhir 1961 masih memengaruhi masyarakat Papua di masa kini untuk menuntut referendum dan memisahkan diri dari NKRI semakin kuat? Bila demikian, kajian ini akan melihat aktor-aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969, dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969.

## **BEBERAPA KAJIAN TENTANG NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA**

Selama ini, belum banyak studi yang dilakukan mengenai nasionalisme Indonesia di Papua, khususnya menyangkut pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Biak 1963-1969. Drooglever (2010:107-108), misalnya, menyimpulkan bahwa

sampai dengan Perang Dunia II perkembangan nasionalisme Indonesia belum menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia II pun tidak ada gerakan nasionalis Indonesia di antara orang Papua yang anti Belanda. Sarjana barat lainnya, Chauvel (2005:1) menegaskan bahwa nasionalisme Papua dewasa ini lebih kuat dari 1961. Pernyataan Chauvel ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia orang Papua lemah dibandingkan dengan nasionalisme Papua, terutama menjelang persetujuan New York 1962.

Sementara itu sarjana Indonesia yang mengkaji nasionalisme di Papua sangatlah terbatas, antara lain adalah Pigay dan Antoh. Pigay menegaskan bahwa “orang Papua sejak awal sudah mengadakan perlawanan menentang orang asing karena didorong oleh ideologi nasionalisme Papua. Semangat nasionalisme ini telah lama ditanamkan oleh Pemerintah Belanda tersosialisasi dari generasi ke generasi selama lebih kurang seperempat abad lamanya. Penanaman ideologi nasionalisme Papua dimulai awal 1940-an ketika Van Echoud mendirikan sebuah Sekolah Pamong Praja di Jayapura (Pigay, 2000: 285). Berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, Pigay (2000: 372) mengatakan bahwa tindakan pemerintah pusat selama berintegrasi politik sejak 1963 pelaksanaan *nation building* dan *character building* untuk mengindoktrinasi simbol-simbol kebangsaan Indonesia sangat kaku. Seakan akan rakyat Papua berada di tengah zaman kolonial; perlakukannya tidak berbeda dengan sistem kolonial.

Kajian Antoh (2000: 67) tidak dapat memberi pemahaman yang jelas tentang perbedaan nasionalisme Papua dan Indonesia. Antoh cenderung menyamakan nasionalisme Papua selain sebagai nasionalisme Papua yang pro-Indonesia juga sebagai nasionalisme Papua yang pro-Belanda sehingga sering sulit untuk memahami perbedaan antara dua nasionalisme itu. Namun demikian, Antoh mengakui bahwa terdapat nasionalisme Indonesia di Papua.

Sementara itu, Meteray (2012: 259:267) menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar menyangkut proses dan karakteristik nasionalisme Papua dan Indonesia sejak 1945 hingga 1962. Nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan

formal berpola asrama yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya, proses penyemaian keindonesiaan di Papua baru dimulai pada 1945 dengan cara yang sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal dan perencanaan matang. Sejak 1945 hingga 1961, cara yang digunakan adalah perjuangan fisik, seperti pemberontakan serta himbauan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik.

Menurut Meteray (2012:268), nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di Papua baru dalam tahap penyemaian di beberapa wilayah, seperti di Jayapura pada akhir 1945, Serui 1946, Biak 1948, dan Sorong 1950. Sebagian besar wilayah di Papua, baik di pantai maupun pedalaman, belum tersentuh keindonesiaan. Ketika nasionalisme Indonesia mulai bertumbuh, sayangnya kurang mendapat ruang yang memadai, sehingga pertumbuhan nasionalisme di Papua mengalami perbedaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Meteray (2011: 283) bahkan menegaskan bahwa sejak 1925 sampai 1962 nasionalisme Papua lebih dominan daripada Indonesia.

Kajian lainnya tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura periode 1945–1949 oleh Meteray dan Jamal (2018: 42) menunjukkan bahwa upaya mengindonesiakan orang Papua diperankan oleh Soegoro Atmoprasodjo. Dia adalah orang Indonesia pertama yang sangat berperan memengaruhi orang Papua menentang Belanda sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Aktor lainnya adalah seorang wanita asal Manado, yaitu J. Gerungan serta aktor utama asal Papua lainnya, yaitu Marthen Indey asal Jayapura dan Corinus Key asal Biak. Kajian ini memperlihatkan bahwa berbagai aksi menentang Pemerintah Belanda adalah semata-mata atas ide Soegoro Atmoprasodjo dan bukan atas inisiatif orang terpelajar Papua. Untuk mempercepat dan mendapat simpati dari orang Papua, penyebaran nasionalisme Indonesia dilakukan, meskipun hanya berupa himbauan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik.

Selanjutnya, kajian lain yang dilakukan oleh Lumintang dan Meteray (2017: 45) tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura sejak 1963 hingga 1965 menunjukkan bahwa

proses bertumbuhnya nasionalisme Indonesia di Jayapura didominasi pendekatan keamanan, pendidikan, dan pemerintahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sementara aktor-aktor yang berperan berasal dari militer/keamanan dan para petugas di dunia pendidikan. Kemudian, kajian lain tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia pascaintegrasi di Jayapura 1966–1969 dilakukan oleh Meteray, Wabiser, dan Timisela (2018: 38). Hasil kajian itu membuktikan bahwa upaya untuk memenangkan Pepera pada 1969 menyebabkan berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Pusat di Jakarta agar peristiwa Pepera yang berlangsung di Papua dapat dimenangkan oleh Indonesia. Maka, upaya untuk menumbuhkan nasionalisme Indonesia pada periode 1966–1969 di Jayapura dilakukan secara terencana dan persiapan yang matang melalui pendidikan di pendidikan formal dan non-formal yang antara lain berupa sekolah, rapat, dan himbauan. Sementara itu, aktor yang terlibat dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia adalah militer dan para petugas di bidang pendidikan.

Terdapat pula kajian yang agak relevan dengan kesadaran keindonesiaan di Biak oleh Meteray (1987: 116–117) tentang perjuangan rakyat di Biak 1945–1962. Hasil kajian mengungkapkan bahwa ada keterlibatan orang Biak dalam mengembalikan Papua ke dalam wilayah NKRI. Kajian ini paling tidak memberi gambaran tentang peran orang di Biak memahami wilayah mereka sebagai bagian dari daerah yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

## **MEMAHAMI KONSEP PENYEMAIAN DAN PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA**

Kajian Meteray (2011) tentang “Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua dan Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925-1962” menunjukkan bahwa Papua yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia sejak rapat PPKI 18 Agustus 1945 mempunyai pengalaman sejarah yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan ini dibuktikan dengan masih berkuasanya Belanda di Papua sejak 1898 hingga 1962.

Ketika hendak mengintegrasikan Papua ke dalam NKRI pasca-1945, Pemerintah Indonesia di Jakarta sesungguhnya tidak pernah melakukan upaya resmi menyemai nasionalisme Indonesia di Papua. Kehadiran beberapa aktor Indonesia lainnya di Papua yang mencoba menyemai dan menanamkan nasionalisme Indonesia telah mendorong integrasi Papua dengan RI. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses munculnya nasionalisme Indonesia di Papua perlu dipandang penting mengingat pertumbuhannya dan perkembangannya mempunyai corak yang berbeda. Perbedaan ini mulai tampak dari proses awal bersemainya nasionalisme Indonesia pada 1945 di Papua.

Untuk memahami fenomena penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua, terlebih dahulu perlu dikaji kata *penyemaian* dalam kajian Meteray (2011:29). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *penyemaian* berasal dari kata dasar *semai(n)*. Sebagai kata benda, *semai* berarti ‘benih tumbuhan (yang sudah berkecambah) yang akan ditanam lagi di tempat lain’. Kemudian, kata *menyemai* sebagai kata kerja adalah ‘menanam (menaburkan) benih (biji-bijian) di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lain’. Apabila kata *menyemai* ditambahkan akhiran *-kan*, maka *menyemaikan* berarti ‘memupuk atau menyebarkan’, sementara kata *penyemaian* adalah sebagai kata benda disebut pesemaian yang artinya ‘tempat menyemaikan bibit, baik pohon maupun biji’. Sementara itu, kata *penyemaian* sebagai kata benda berarti ‘proses, cara, perbuatan menyemaikan’.

Meteray (2011:30) menyatakan bahwa pengertian kata *penyemaian* memperlihatkan bahwa, istilah *penyemaian* tidak hanya digunakan dalam bidang pertanian melainkan dapat digunakan dalam kajian sejarah. Maka, istilah *penyemaian* digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana proses penyemaian dua nasionalisme Indonesia di Papua yang menyangkut aspek menanam, merawat, dan memanen. Dengan demikian, pemakaian kata *penyemaian* dalam kajian Meteray ini mengacu pada benih kepulauan dan keindonesiaan yang ditanam oleh para penggagasnya, baik yang berasal dari Papua, Indonesia, maupun Belanda.

Kajian ini memperlihatkan dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam proses dua penyemaian ini, baik dalam proses penanaman, pemberi semangat untuk menyebarkan bibit dua nasionalisme, maupun siapa saja yang bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhan di kemudian hari. Di samping itu, kajian ini tidak hanya memperlihatkan dengan jelas daerah mana yang benih penyemaian dapat berkembang dan daerah mana yang mengalami kegagalan, namun juga memperlihatkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan benih-benih tersebut. Kajian ini pun tidak hanya berhenti pada proses penyemaian, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari dua nasionalisme, yaitu Papua dan Indonesia di Papua.

Menurut Meteray (2011:30), penggunaan kata *penyemaian* merupakan suatu konsep baru dalam kajian sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian para sejarawan ketika membahas nasionalisme di Indonesia. Bagi Meteray, penyemaian merupakan kata kunci untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesadaran sekelompok masyarakat terhadap negaranya. Konsep penyemaian ini juga sangat penting bagi suatu *nation state* yang memiliki tingkat keanekaragaman sangat tinggi seperti Indonesia. Penggunaan kata *penyemaian* sebagai suatu konsep metaforis dalam sejarah, khususnya di Indonesia, akan dapat menghilangkan generalisasi yang selama ini sering dilakukan, baik oleh negarawan, politisi, dan akademisi dalam memahami masalah nasionalisme di Indonesia.

## **PEMBUKAAN SEKOLAH PAMONG PRAJA DI JAYAPURA DAN PENYEMAIAN BIBIT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK**

Biak merupakan salah satu daerah di bagian utara Papua yang berdekatan dengan Serui yang sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar Papua. Andaya (1993: 88) menjelaskan bahwa kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi migrasi orang Biak yang berada di sekitar teluk Cenderawasih dan kepulauan Padaido dengan penduduk di bagian timur Halmahera dan kepulauan Raja Ampat. Sementara itu, kontak orang

Biak dengan bangsa barat, yaitu VOC dimulai pada 1610 dan kemudian ketika masuknya agama Kristen di Biak pada 1908 dan bangsa Jepang pada 1942. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila menurut Pemerintah Belanda, dari bidang pendidikan, masyarakat Biak memiliki bakat tertentu, terutama dalam hal-hal teknis, sehingga pemahaman tentang kesehatan dan keinginan untuk mempelajari sesuatu serta hal-hal yang secara umum telah dimiliki oleh masyarakat Biak berbeda dengan masyarakat di bagian pantai selatan (Rapport Inzake nederlands Nieuw Guinea Over het jaar 1954:33). Sesudah Perang Dunia II, tepatnya 1944, secara administratif Biak merupakan salah satu *onderafdeeling* dari *Afdeeling Noord* Nieuw Guinea. *Onderafdeeling* Biak terdiri dari distrik Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfoor. Biak yang merupakan sebuah pulau kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, namun jumlah penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan Sekutu, Biak menjadi tempat kedua sesudah Jayapura. Banyak penduduk asli Biak merasakan kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak, seperti memperoleh makanan dan pakaian.

Untuk segera mendapat kepercayaan dari rakyat Biak, berbagai cara digunakan Pemerintah Belanda, seperti segera menggiatkan kembali sekolah-sekolah yang ditutup akibat perang. Semua lulusan sekolah guru di Mieie ditempatkan kembali untuk mengajar, sedangkan bagi guru-guru yang memiliki ijazah Sekolah Rakyat tiga tahun diberi kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga pada bidang pelayaran, kesehatan, tentara, dan polisi. Namun, bagi guru-guru yang tidak berkeinginan mengajar, mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi *Bestuur* (Pamong Praja zaman Belanda).

Pendidikan Pamong Praja yang diadakan di Hollandia (sekarang Jayapura) Jayapura selama enam bulan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada Juli 1945. Putra asli Biak yang mengikuti pendidikan itu antara lain adalah Frans Kaisieppo, Eduard Rumbrar, Markus Kaisiepo, Marttinus Rumayau, dan Lukas Rumkorem. Sekolah Pamong Praja ini dikepalai oleh Soegoro Atmoprasodjo, bekas pemuda Taman siswa dan seorang eks-Digulis yang dibawa kembali

Pemerintah Belanda menjadi kepala Sekolah Pamong Praja. Sebagai pengajar, Soegoro berupaya menanamkan ajaran kemerdekaan dan patriotisme kepada murid-muridnya dengan harapan bahwa ide kemerdekaan Indonesia dapat merembes ke dalam diri para siswa, termasuk yang berasal dari Biak. Soegoro Atmoprasodjo, menurut Corinus Krey, adalah orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di kota Nica (sekarang Kampung Harapan: Jayapura) antara lain melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, Marcus Kaisiepo siswa asal Biak, menjelaskan bahwa dia mendengar berita proklamasi melalui radio di kota Nica dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu.

Pada September 1945, Lukas Rumkorem salah satu siswa yang dikirim ke Jayapura, membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas Rumkorem mengadakan rapat di Nusi pada September hingga November 1945 dan pada Januari 1946 di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan Lukas Rumkorem ini ternyata diketahui oleh HPB (*Hoofd Plaatselijk Bestuur*) yang diinformasikan oleh beberapa orang asal Yapen. Dari orang Yapen tersebut diperoleh informasi tentang adanya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata api. Perkara ini tidak dilanjutkan karena HPB ini cuti sakit (Meteray: 2012, 80). Namun, laporan ini akhirnya juga diketahui oleh residen sehingga Lukas Rumkorem dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai karena telah mengintimidasi rakyat. Aktivitas Lukas Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada kepala distrik di Serui.

Dari berbagai tindakan yang dilakukan Lukas Rumkorem akhirnya ditahan pada pertengahan Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Jayapura sambil menunggu pengadilan. Menurut sumber yang lain, yaitu laporan *Report of the Committee New Guinea pada 1950*, Lukas Rumkorem adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) pada 7 Oktober 1945. Ketika menjawab pertanyaan yang diajukan komisi tersebut tentang PIM, Lukas Rumkorem menjelaskan alasan ditahan selama dua setengah tahun di penjara karena dituduh merencanakan membunuh

Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo (Meteray, 2012: 81). PIM yang didirikan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak, terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi kemerdekaan. Namun, dalam perkembangannya, PIM tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena terdapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Meskipun demikian, partai ini akhirnya juga mendapat dukungan dari Corinus Krey setelah tiba di Biak dari Jayapura pada 7 Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan pertemuan di rumah kepala kampung Yenures, David Rumaropen, untuk mengadakan reorganisasi PIM. Maka, pada 5 Oktober 1949 PIM diaktifkan kembali di Bosnik, di rumah kediaman Lukas Rumkorem, dengan Lukas Rumkorem sebagai ketua PIM, Corinus Krey sebagai wakil ketua PIM, J. Tarumaselly sebagai penasehat, Petrus Warikar sebagai sekretaris. Oleh karena kegiatan Lukas dianggap menentang Pemerintah Belanda, Lukas Rumkorem ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura (Daftar Riwayat Hidup Corinus Krey, 1990). Kehadiran PIM di Biak ini tampak dalam surat Inggamer sebagai anggota PIM kepada Silas Papare pada 14 Desember 1949 (Arsip Pribadi Yoris Raweyai, Surat Inggamer di Biak, 14-12-49. kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49). Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan secara rahasia untuk menyebarkan upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah. Akibatnya, Corinus dan kawan-kawannya ditahan dan dikirim ke penjara Jayapura.

Sementara itu, de Bruijn yang pada waktu itu menjabat kepala distrik di Biak (Penders, 2002:87-88), mengorganisasi dewan daerah ‘*Kakain karkara*’ yang didirikan pada 20 November 1947. Lembaga ini berfungsi untuk mendorong masyarakat untuk memaksimalkan kemampuan mereka membangun kampung. Selama gerakan *Koreri* berlangsung, banyak masyarakat Biak yang menderita. Banyak sekolah dan gereja ditutup, bahkan dirusak.

Gerakan *koreri* muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat kehadiran bangsa Barat, Jepang, dan Indonesia lainnya. Banyak masyarakat Biak yang merasa

takut mencoba untuk menjauhkan diri selama berlangsungnya pergerakan itu. Menurut laporan tahunan pemerintah Belanda pada 1948, masyarakat Biak cenderung mengaitkan kegiatan politik dengan gerakan *Koreri*. Hal itu membuat banyak masyarakat Biak tidak tertarik pada kegiatan politik (NA., De Bruijn Residentie Nieuw Guinea, Javerslagen Biak 1947&1948.). Dengan demikian, sampai dengan awal 1948 tidak ada aktivitas politik. Keengganan masyarakat Biak ini tidak disebabkan oleh tidak adanya orang Biak yang tertarik pada politik, tetapi karena pengalaman masyarakat selama masa pergerakan *Koreri*.

### **MERESPONS NASIONALISME INDONESIA DI ANTARA ORANG BIAK PADA 1948**

Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi kontak secara intensif dengan Makasar dalam bidang politik, kehadiran Petero Jandi asal Makasar telah memperlihatkan bahwa secara tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan Makasar. Pada pertengahan 1947 Petero Jandi bekerja di dapur umum di pangkalan udara Biak. Namun, akibat minuman keras, Petero Jandi dipecat dan dikembalikan ke Makasar. Meskipun begitu, Petero Jandi kembali lagi ke Biak pada Desember 1947 (NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948). Setelah mengadakan kontak dengan Departemen Sosial di Makasar, Petero Jandi memperoleh pekerjaan di Kamp NICA Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Josef yang juga pegawai kepercayaan de Bruijn. Kedekatan Stefanus Josef dengan de Bruijn berawal ketika de Bruijn bertugas sebagai pengawas di danau Wissel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Stefanus Josef bekerja dengan Jepang, namun ketika kedatangan Sekutu, Stefanus Josef menjadi orang kepercayaan de Bruijn (1978: 294). Sesudah perang, Stefanus Josef ditunjuk oleh de Bruijn sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Josef serumah dengan Petero Jandi setelah de Bruijn mendapat jaminan bahwa Petero Jandi adalah seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait yang menjabat sebagai *bestuursassistent* di Biak sedang berlibur di Ambon, Stefanus Josef ditunjuk

sebagai *bestuursassistent* dan juga bertugas mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun, sebagai akibat dari pertemuannya dengan Petero Jandi, diadakanlah rencana untuk melakukan pemberontakan melawan Pemerintah Belanda di Biak (de Bruijn, 1978: 294). Menurut Stefanus Josef, Petero Jandi adalah seorang ekstrimis yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya dikirim ke Biak.

Hanya setahun di Biak, Petero Jandi dapat memobilisasi pemuda-pemuda di Biak. Stefanus Josef dan Petero Jandi berhasil memengaruhi dua tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak yang bernama Hermanus Rumere dan seorang berasal Ambon yang bernama Watti. Stefanus Josef dan Watti memimpin penyerangan pada pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret 1948. Salah satu tokoh penting dalam rencana penyerangan itu adalah Hanoch Rumbrar yang merupakan salah seorang juru tulis pamong praja di Korido dan merupakan bawahan langsung HPB yang juga dekat dengan Stefanus Josef (de Bruijn, 1978: 294). Hanoch Rumbrar menjadi mediator antara Petero Jandi dan masyarakat. Sejak Januari hingga Februari, Hanoch Rumbrar ditugaskan untuk mengadakan kampanye di masyarakat dengan menyatakan dua hal. *Pertama*, dalam kaitan dengan kolonisasi, Pemerintah Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang Papua. *Kedua*, seluruh wilayah di kepulauan ini sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri sementara Papua belum karena Belanda masih menginginkan mempertahankan kekuasaannya di sini. Selama Pemerintahan Belanda masih di sini, maka rakyat akan dipaksa untuk membayar pajak (NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948).

Sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret 1948, Petero Jandi bersama Stefanus Josef juga mengadakan propoganda di kampung-kampung, dengan mengunjungi beberapa keluarga untuk mendapat dukungan. Kampanye itu mempropaganda perlunya perjuangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menentang Belanda. Dalam propoganda itu dikatakan bahwa apabila masyarakat tidak dapat dilepas dari Belanda, maka Papua tidak akan berdiri

sendiri dan tidak pernah akan menjadi bagian dari “Republik Soekarno”. Belanda akan menjadikan Papua sebagai koloninya dan menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi dari Belanda (Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr.56 Title Biak Affaire Date 1948). Petero Jandi juga mencoba mengadakan pendekatan dengan beberapa kepala kampung di Biak. Namun, rakyat di kampung-kampung menolak untuk bekerja sama. Penolakan itu bukan karena mereka pro-Belanda, melainkan karena rakyat masih mengalami trauma dengan peristiwa Manseren pada 1942-1943 (NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948). Keterlibatan dalam kegiatan PKII bagi orang Biak akan menimbulkan banyak risiko dan akan membangkitkan kembalinya gerakan Manseren Koreri (NA. Jaarsverslag 1947 van de residentie Nieuw Guinea, Van Eecloud 23 April 1948).

Untuk memperkuat perlawanannya, Petero Jandi juga berupaya mencari dukungan dari PKII di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus Josef dan Petero Jandi pernah mengirim dua surat ke kelompok Ratulangi, khususnya kepada Saleh (salah satu nasionalis Indonesia yang diasingkan bersama Ratulangi di Serui). untuk menyampaikan rencana 14 Maret ini, namun tidak pernah mendapat balasan. Meskipun demikian, ada telegram dari istri Saleh kepada Petero Jandi yang mengatakan “Toenggoe malam Djoemahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke Djokjakarta.” Nampaknya, ada keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk bertemu dengan kelompok Ratulangi yang hendak kembali ke Jakarta melalui Biak (NA. Algemene Sevretaiie batavia Niieuw Guinea 1919-1949 Invent nr.56 Title *Biak Affaire Date 1948*). Namun, sumber ini memberi simpulan bahwa kelompok Ratulangi seharusnya mengetahui aksi ini, tetapi tidak terlibat di dalamnya.

Seminggu sebelum aksi ini dilaksanakan, de Bruijn sedang melakukan perjalanan dinas. Stefanus Josef menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan para tahanan di penjara. Dalam pertemuan itu direncanakan untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap beberapa tempat penting milik Pemerintah Belanda di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan

menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan ini ditujukan untuk membunuh semua orang Eropa di Biak dan setelah menguasai Biak, aksi ini kemudian akan dilanjutkan membebaskan para tahanan di Serui, dan kemudian menyerang Manokwari dan Sorong.

Pada 13 Maret 1948, Petrus Korwa dan Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk menjemput beberapa putra Papua yang sudah dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan penyerangan. Pada malam itu Petero Jandi menyerang stasion radio dengan dibantu enam pemuda Biak dari kampung Mokmer yang dipersenjatai. Namun, sebelum waktu yang ditentukan, salah seorang pemuda asal Biak, Terrianus melakukan penembakan terhadap salah seorang sersan Belanda Schipper sehingga keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian, terjadilah baku tembak antara pemuda asal Biak dengan tentara KNIL. De Bruijn diberi informasi bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada di tempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan Stefanus Josef ini dianggap sangat mengecewakan de Bruijn (Meteray, 1987: 75). Pada hari Senin Stefanus Josef ditangkap, sementara Petero Jandi, Hanoch Rumbrar, dan lainnya ditangkap pada hari Selasa. Kejadian ini menyebabkan 40 orang Papua, termasuk Stefanus Josef, dipenjara di Jayapura dan kemudian dipindahkan ke penjara Cipinang Jakarta dan dibebaskan pada 1950. Sementara itu, pelaku utama seperti Petero Jandi dihukum mati di Jayapura. Petrus Korwa dan Hanoch Rumbrar yang awalnya menyembunyikan diri di hutan selama seminggu, akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 10 hingga 15 tahun. Pelaku lainnya Terianus Simbiak dihukum 15 tahun, Marcus Watimena 10 tahun, Petrus Korwa 8 tahun. Mereka dipenjara di Digul (Meteray, 1987: 76).

Menurut Pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret 1948 semata-mata merupakan inisiatif oleh orang Indonesia, seperti Petero Jandi dan Stefanus Josef, dengan hanya melibatkan beberapa orang Papua. Sumber ini juga menyebutkan bahwa

terjadinya penyerangan ini disebabkan oleh adanya konflik antara orang Ambon dan Papua di Biak. Ada perbedaan tajam antara orang Ambon dan Papua, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. De Bruijn menemukan bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi yang penting daripada orang Papua sehingga menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya kesamaan dan perbaikan hidup orang Papua di Biak (De Bruijn, NA. Jaarsverlag 1947&1948, nr.188).

Namun, ada pula pendapat dari pihak pemerintah bahwa terjadinya aksi 14 Maret disebabkan oleh kurang adanya kontrol oleh pemerintah setempat terhadap orang Indonesia yang tiba di Biak dengan kapal KPM. Terdapat dua anak buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari Kalianda. Bidan Ratulangi berpindah menjadi perawat Eropa yang bertugas di Serui, tetapi tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja di Biak selama dua bulan juga menunjukkan tidak ada pengawasan yang baik di Biak (NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948 ).

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Stefanus Josef dan Petero Jandi mengakui bahwa mereka telah mengirim surat-surat ke Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret, namun surat tersebut tidak ditanggapi. Sementara itu, menurut pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa 14 Maret merupakan aksi yang dimotori oleh Petero Jandi dan pergerakan Palombangkeng di Sulawesi Selatan sehingga menurut sumber ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKII di Serui (Rapportage Indonesia Invent 777 Title Oversight en Ontwikkeling Van den Toestand date December 1947-December 1948).

Walaupun peristiwa 14 Maret ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas PKII di Serui, aksi ini memperlihatkan bahwa keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk menentang pemerintah Belanda mencerminkan aksi yang dilakukan itu bertujuan untuk menyatukan Papua dengan NKRI. Menurut de Bruijn, aksi 14 Maret ini terjadi karena adanya perkembangan

politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai pengaruh hingga di Papua, khususnya di Biak. Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa pengunjung yang secara tidak langsung membawa benih-benih pemberontakan terhadap Pemerintah Belanda (Bruijn, 1978: 294). Aksi ini memperoleh dukungan dari para pemuda Papua di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petero Jandi dan Stefanus Josef ini dapat disejajarkan dengan aksi Soegoro Atmosodjo.

Di samping itu, terdapat pula upaya yang dilakukan kelompok PKII di Serui untuk memperluas pengaruhnya di Biak. Namun, pengaruhnya sangat terbatas. Hal ini diakui oleh de Bruijn bahwa memang terdapat kontak antara Biak dan Japen, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Memang dikatakan bahwa pernah terjadi konflik antara orang Biak dan Serui menyangkut politik, meskipun konflik yang ada ini lebih mengarah pada pernyataan-pernyataan politik yang seakan menandakan bahwa Serui sebagai daerah pro-Indonesia dan Biak pro-Belanda. Hal ini terungkap dalam pernyataan seperti “Jika Biak menang, maka pemerintah Belanda akan berlanjut. Sementara jika Serui menang, maka pemerintah RI yang akan melanjutkan.” Bahkan, dikatakan pula “*Kamoe orang Biak bodoh. Kita orang Japen, Serg. Papare soedah pigi di Makasar ada bawa chabar for kita orang di Japen nanti Soekarno datang boenoeh kamoe orang Biak*” (NA.Jaarsverslagen Biak 1947&1948 Van de BruyinResidentie Nieu Guinea).

Berbeda dengan Jayapura dan Serui, motivator aksi menentang Pemerintah Belanda di Biak dipelopori oleh seorang pemuda asal Makasar, yaitu Petero Jandi yang kehadirannya di Biak tidak ada kaitannya dengan berbagai kebijakan Pemerintah Belanda di Papua. Petero Jandi bertugas sebagai pemimpin di lapangan dan arsitek pemberontakan ini. Menurut Hanoch Rumbrar, Petero Jandi adalah buronan Pemerintah Belanda di Makasar dan melarikan diri ke Biak. Dengan keberaniannya, dia mengadakan konsolidasi dengan Stefanus Josef yang menjadi pemimpin utama pemberontakan bersama beberapa pemuda asal Biak. Stefanus Josef pada saat itu ditugasi mengawasi rumah tahanan di Nicakamp. Stefanus

Josef berasal dari Ambon dan lulus OSVIA di Makasar dan pernah bergerilya bersama de Bruijn yang menjadi HPB di Enarotaly semasa pendudukan Jepang. Sementara tokoh penting lainnya adalah Hanoch Rumbrar asal Biak yang bertugas sebagai juru tulis di Korido, bekas siswa sekolah guru di Mie, namun tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena pendudukan Jepang.

Walaupun pemberontakan ini direncanakan dengan baik, dukungan masyarakat di Biak terhadap upaya Petero, Josef, dan Hanoch Rumbrar sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan dalam peristiwa 14 Maret yang hanya berasal dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat dukungan dari masyarakat Biak di sekitarnya. Faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat Biak adalah tidak ada figur nasionalis yang ideologis dari Indonesia.

### **KONDISI PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PADA 1958**

Pada 1958 di Biak terdapat organisasi yang bernama Tentara Tjadangan Tjenderawasih (TTT) yang kembali dipelopori oleh Lukas Rumkorem sekembalinya dari tahanan di Jayapura. Dengan mendapat dukungan dari beberapa pemuda di Biak, dilakukanlah pertemuan rahasia dan akhirnya dibentuklah TTT pada 1958. Menurut J. Tarumaselly, seorang simpatisan TTT telah memiliki cabang-cabang lainnya di daerah-daerah lain di Papua. Pengurus TTT cabang Biak adalah: Lukas Rumkorem sebagai penasehat, David Woisiri sebagai ketua, J. Tarumaselly sebagai sekretaris, Faidiban sebagai bendahara, dan dibantu oleh beberapa pemuda, yaitu Marten Mayor, Albert Marantika, Aris Kadun, Yonathan Saroy, dan Rafael Maselkosu. Para pemuda yang umumnya terlibat dalam organisasi ini adalah mereka yang tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948. Di samping itu, para pemuda yang terlibat ini tidak terbatas pada pemuda Papua asal Biak, tetapi juga dari luar Papua (Meteray, 1987: 94).

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah rapat-rapat rahasia karena pada masa itu terjadi pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain

kondisi di daerah luar Biak, khususnya di Jakarta. Kegiatan lainnya adalah mengirim pemuda ke luar Biak untuk bergabung dengan para gerilyawan yang akan menyusup ke Papua (Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, 1961: 132). TTT juga melakukan kontak dengan konsulat Republik Indonesia di Singapura. Dalam surat balasan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura pada 12 Nopember 1958, diinformasikan bahwa surat sebanyak sembilan buah telah diterima (J. Tarumaselly:1949). Pengiriman surat-menyurat dilakukan dengan kapal laut KPM dan dengan memanfaatkan warga keturunan Cina yang mendukung perjuangan rakyat di Biak. Pada masa itu orang-orang Cina diberi kebebasan untuk melakukan usaha mereka (Meteray, 1987:97). Kegiatan lainnya adalah melakukan pemotretan terhadap lokasi-lokasi penting di Biak, seperti lapangan terbang, markas angkatan laut, pos-pos penjagaan Belanda yang strategis. Tugas pemotretan yang merupakan tugas yang sangat berbahaya dilakukan oleh J. Tarumaselly dan T. Rumngeur. Data-data ini kemudian akan dikirim ke luar Biak, yaitu ke Kedutaan Besar RI di Singapura, Ambon, Jayapura, dan Serui. (Meteray, 1987:97).

Kegiatan TTT ini ternyata tidak dapat dilanjutkan karena akhirnya diketahui oleh Pemerintah Belanda di Biak. Maka, diadakanlah penangkapan terhadap David Woisiri, Rafael Maselkosu, J. Tarumaselly, Jonathan Saroy, dan Frits Werluken, salah seorang pengurus TTT cabang Serui. Tuduhan yang diberikan adalah melakukan kegiatan menentang Belanda dan mendukung kemerdekaan RI di Papua (J. Tarumaselly:1949).

## **PROSES PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PASCA TRIKORA 1961**

Berbicara di depan mahasiswa Sekolah Tinggi Militer di Bandung, Soekarno mengatakan bahwa pembebasan Papua dari Belanda sudah di tangan (The New York Times, 1 January 1961). Soekarno juga mengatakan: “kami tidak ingin menunggu lama lagi” dan Soekarno juga telah memerintahkan kekuatan militer untuk membebaskan Papua (The New York Times, 1 January 1961). ada 19 Desember 1961, Soekarno

mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh wilayah Papua, dan menyiapkan mobilisasi umum.

Dengan diumumkan Trikora, dimulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala. Komando Mandala ini merupakan aparat yang menyelenggarakan operasi militer untuk merebut Irian Barat atas segala kegiatan operasional ABRI serta para sukarelawan. Di berbagai kesempatan kunjungan Presiden Soekarno di beberapa daerah di Indonesia selama 1962 antara lain di Medan, Palembang Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, upaya mempertahankan Papua terus digalakkan dalam setiap pidatonya. Dalam pidato di depan Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962, Presiden Soekarno mengatakan:

Ya saudara-saudara, sekali lagi, kepada para veteran yang dulu bertempur hebat-hebatan untuk mendatangkan satu negara Republik Indonesia Kesatuan berwilayah kekuasaan antara Sabang sampai Merauke, kepada saudara-saudara saya ulangi lagi, Trikormando Rakyat tidak dicabut kembali, bahkan harus dipergiat. Malahan saya tandaskan lagi disini buat ke dua kalinya apa arti Trikomando. Trikomando berarti membebaskan Irian Barat daripada kolonialisme Belanda Trikomando berarti, agar supaya kita memasukkan Irian Barat itu kedalam wilayah kekuasaan Republik kembali, *dengan segala jalan*. Pegang teguh perkataan ini: dengan segala jalan! Jalan apa? Diplomasi. Jalan apa, kataku pada waktu Idulfitri? Infiltrasi, gremetono Irian Barat! Dengan jalan pertempuran -pertempuran kecil, dengan jalan pertempuran-pertempuran besar, dengan jalan pertempuran total, kataku. Pokoknya dengan segala jalan halal menurut agama, halal menurut mental kita sebagai bangsa, harus kita bebaskan Irian barat dari pada penjajahan belanda atau penjajahan apapun.

Bila mengacu pada isi Trikora 1961 di atas, semua kekuatan dipersiapkan untuk membangun nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua secepat mungkin. Menurut Djopari (1995: 82 ), “dengan melihat situasi politik pada periode 1963

hingga 1964 awal integrasi di Irian Jaya fokus pembangunan diletakkan pada pembangunan ideologi dan politik, yaitu untuk menanamkan Pancasila dan nasionalisme Indonesia”.

Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut (Djopari:1995: 38):

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Papua kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA=*United Nations Temporary Executive Authority*) pada 1 Oktober 1962.
2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Papua berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.
5. Pada tahun 1969 rakyat Papua diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-Belanda) tahun 1962 memuat ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (*Act of Free Choise*) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan “nasihat, bantuan, dan partisipasi” PBB yang meliputi empat butir sebagai berikut. *Pertama*, konsultasi atau musyawarah dengan sembilan dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. *Kedua*, dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan *Act of Free Choise*. *Ketiga*, suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan

hubungan mereka dengan Indonesia. *Keempat*, suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional (Djopari, 1995: 38).

Sejalan dengan berbagai persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pemerintah Indonesia terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat Papua menuju pelaksanaan Pepera. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan Papua dengan Jakarta. Pada 29 September hingga 19 Oktober 1962 dikirim delegasi dari Papua sebanyak 19 orang mengunjungi wilayah Indonesia, termasuk bertemu Presiden Soekarno di Jakarta (penerbitan Sekretariat Koordintor Urusan Irian Barat, 1964:29).

Pada 1 Mei 1963 berlangsung penyerahan pemerintahan atas Papua dari UNTEA kepada Indonesia. Esoknya pada 4 Mei 1963 tiba kapal penjelajah Indonesia di pelabuhan Hollandia (Jayapura). Pada kapal tersebut ada Presiden Soekarno bersama duta besar Amerika dan Jepang. Dari atas kapal, Soekarno menjelaskan sejarah berakhirnya penjajahan Belanda dan kembalinya Papua ke Indonesia. Pada kesempatan itu Soekarno mengajak orang Papua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan meneriakkan “pekik merdeka.” Menurut laporan W.A. Vawdrey, pegawai kantor pada kantor penghubungan Australia, orang Papua yang hadir di sana dibawa oleh Brimob dan kemudian Brimob juga mengantar kembali. Pada 5 Mei 1963, Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga pada monumen yang dibangun di dekat Sentani untuk memperingati para pasukan yang telah gugur pada waktu itu (Drooglever, 1995:644).

Setelah dilaksanakan penyerahan pemerintahan di Papua kepada Republik Indonesia, resmi lah berlakunya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku sejak penyerahan pemerintahan kepada Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu mengatur kedudukan wilayah Papua yang baru, yakni dalam kerangka NKRI serta bentuk, susunan, dan wewenang pemerintah daerah Papua yang baru.

Dengan adanya penyerahan pemerintahan wilayah Papua kepada Republik Indonesia,

daerah Papua sejak saat itu bagian dari NKRI, baik *de jure* maupun *de facto*, termasuk dalam lingkungan kekuasaan penentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan untuk Irian Barat. Seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua sejak 1 Mei 1963 adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
3. Badan Pemerintah Harian
4. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan membawakan Biro-biro.
5. Dinas-dinas
6. Perusahaan daerah
7. Satuan-satuan wilayah pemerintahan
8. Badan-badan khusus
9. Pantja Tunggal

Pada tanggal 1 Desember 1963 para wakil rakyat Papua menyatakan kebulatan tekad setia pada NKRI. Yang bertanda tangan berjumlah 34 orang dengan 2 utusan dari Biak, yaitu Ds. F.J.S Rumainum dan Frans Kaisieppo. Kemudian, pernyataan bersama karyawan pendidikan asal Papua berjumlah 16 orang. Karyawan yang berasal dari Biak adalah L. Manidbodibo dan N. Urbinas (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964: 47-50). Di bawah ini isi pernyataan;

#### PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD

Pada ini hari tanggal 1 Desember 1963, kami pemuka-pemuka rakyat serta wakil-wakil golongan dari masyarakat Irian Barat telah mengadakan musjawarah di Kotabaru ibu negeri propinsi Irian Barat membitjarakan masalah pembangunan di Irian Barat untuk mengatasi amanat penderitaan rakyat.

Sesuai dengan ini maka kami telah membulatkan tekad untuk mengutamakan masalah pembangunan tersebut sesuai dengan Penetapan Presiden no. 14/1963 dan kami bersedia membantu pemerintah dan angkatan bersenjata untuk membasmi anasir yang bersifat subversif dan yang bertujuan mengatjau rakyat Irian Barat supaya pembangunan diarah ini terhalang adanya.

Berdasarkan ini maka kami telah setuju mengadakan pernjataan sebagai berikut:

#### PERNJATAAN

1. Kami hanja mengakui adanya Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang hingga Merauke.
2. Kami hanja mengakui satu lambang negara ialah Sang Saka Merah Putih
3. Kami hanja mengakui adanya satu bangsa dari Sabang hingga Merauke ialah bangsa Indonesia
4. Kami hanja mengakui satu Front Nasional, jaitu Front Nasional jang dipimpin oleh Bung Karno sendiri dan jang berpusat di Djakarta.

#### II Selanjutnya

1. Kami tidak mengakui apa jang disebut Negara Papua Barat, karena ini adalah alat provokasi pemerintah kolonial Belanda untuk memetjah-belah Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Kami tidak mengakui bendera Papua Barat, karena ini adalah merupakan alat provokasi pemerintah kolonial Belanda untuk menipu rakyat Irian barat dan dunia internasional teristimewa Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan maksud mempertahankan kolonialisme dan imperialisme di daerah Irian Barat sampai selama-lamanya.
3. Kami tidak mengakui adanya bangsa Papua atau Negrito karena ini adalah merupakan alat provokasi dari pemerintah kolonial Belanda untuk memetjah belah kesatuan bangsa Indonesia.
4. Kami tidak mengakui apa jang disebut Front Nasiona Papua jang berpusat sekarang dinegeri Belanda, karena ini adalah merupakan alat provokasi dari pemerintah kolonial Belanda serta kaki tangannja untuk mengatjaukan keamanan, ketertiban serta pembangunan di Irian Barat.

Demikianlah pernjataan ini dibuat di Kotabaru pada tanggal jang tersebut diatas dan ditandatangani oleh kami.

Pernyataan di atas ini ditandatangani oleh 34 orang yang berasal dari Papua, termasuk Biak. Sementara itu, kegiatan penting lainnya adalah "Penandatanganan Piagam Kotabaru" pada 3 Februari 1963. Isi Piagam Kotabaru yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan (Koordinator Urusan Irian Barat: 1964: 291-292). Di bawah ini terdapat 3 dari 6 pernyataan sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat tanpa menengenal perbedaan suku, aliran keyakinan dan golongan, telah bersatu padu seia sekata dan bahu membahu untuk membangun wilayah Irian Barat dalam lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat adalah pendukung cita-cita persatuan kebangsaan Indonesia yang adil dan beradab dan yang telah dimulai sejak zaman kebesaran sriwijaya dan Majapahit
3. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat memikul tanggung jawab atas kemanan ketertiban dan kesentosaan wilayah Irian Barat sebagai daerah dan modal perjuangan rakyat dan republik Indonesia dengan sepenuh penuhnya tenaga dan jiwa.

Dalam sambutan Sudjarwo setelah penandatanganan Piagam Kotabaru, dinyatakan bahwa:

Resolusi yang mengesankan yang ditandatangani di Kota Baru tanggal 3 Pebruari 1963 oleh pemimpin-pemimpin dari praktis semua golongan penting di Irian Barat yang dinamakan Piagam Kota Baru. Mereka bersiap menyambut pemerintah Republik Indonesia ini di daerah ini dengan penuh pengertian, sebagai pemerintah yang tidak asing lagi bagi mereka, bahkan sebagai pemerintah nasional yang sebenarnya, berdasarkan proklamasi kemrdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang telah menggelorakan kemerdekaan rakyat dari Sabang sampai Merauke. .... Kami yakin bahwa pengertian dan keinsafan rakyat Irian Barat itu akan merupakan faktor yang penting bangi penyelesaian persetujuan Indonesia Belanda sesudah 1 Mei.

Upaya lainnya adalah diselenggarakan kunjungan para pelajar asal Papua pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964. Para pelajar ini terdiri dari 25 pelajar yang berasal dari Jayapura dan Biak. Kehadiran mereka didampingi oleh 2 pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Kehadiran para pelajar ini untuk menyaksikan pembangunan yang berlangsung di Jawa. Salah satu komentar pelajar SMA asal Biak, Stefanus Namfuni ketika mengunjungi pabrik Saridele Yogyakarta mengatakan antara lain bahwa “Bangsa Indonesia tidaklah ketinggalan dalam pembangunan” (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:72). Pada kesempatan itu pula, para pelajar asal Papua ini membuat

pernyataan kebulatan tekad pada 10 Januari 1964 di Bandung. Pernyataan kebulatan tekad wakil pelajar di Kotabaru (sekarang Jayapura) dan Biak dilakukan dengan berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, para pelajar dengan tegas menyatakan bahwa Papua adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Pelajar yang mewakili Biak antara lain adalah Mathias Rumsarwir, Stefanus Nafuni, Willem Rumpombo, dan Steven Faidiban.

Sejak 1963, berbagai upaya pemerintah Indonesia dilakukan untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintahan baru di Papua. Kegiatan umumnya berupa mengirim orang Papua, termasuk Biak, ke Jayapura untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian, pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964 diadakan kunjungan para pelajar sekolah-sekolah dan tokoh masyarakat, adat dan pendidik di Papua termasuk dari Biak ke Jawa. Kunjungan ini di beberapa tempat penting seperti di Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Magelang. Salah satu karyawan pendidikan asal Biak, L. Mandibodibo membuat pernyataan untuk membaktikan diri pada Pancasila dan Manipol Usdek sebagai acuan pada 12 Maret 1964. L. Mandibodibo adalah satu dari 13 orang karyawan pendidikan yang mengadakan kunjungan ke Jawa (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:128).

Sementara kegiatan yang dilakukan di Jayapura adalah menghadiri musyawarah besar, yaitu musyawarah ke-1 Rakyat Provinsi Irian Barat. Musyawarah ini dihadiri wakil-wakil rakyat dari seluruh daerah di Papua dan dilakukan secara berjenjang sejak 30 April hingga 9 Mei 1964 (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:246-260). Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pernyataan deklarasi Kebulatan Tekad Golongan Wanita Irian Barat tanggal 5 Mei 1964 dihadiri wakil Biak : B. Urbinas dan Koibur;
2. Musyawarah golongan suku adat tanggal 3 Mei 1964 diwakili oleh B. Maker;
3. Musyawarah golongan rohaniawan 8 Mei 1964: Achmad Chotip, M. Rumbino, Ds. M Robaha, Ds. Prawar;
4. Musyawarah golongan pemuda 6 Mei 1964: Ds. Ondi, Th, Mandowen, Nn Zainab;

Penandatanganan deklarasi Rakyat Provinsi Irian Barat pada tanggal 9 Mei 1964 di Jayapura oleh putra asal Biak, yaitu Frans Kaisieppo mewakili golongan suku/adat, Pendeta Ds. F.J.S. Romainum, berasal dari golongan rohaniawan, Otto Wospakrik sebagai wakil ketua, dan Ds. A. Prawar sebagai wakil ketua.

## **PROSES MERAWAT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PASCA 1963-1969**

Pada Desember 1962, para sukarelawan mulai didatangkan di Biak dengan menggunakan pesawat elektro dan hercules. Para sukarelawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini bukan hanya pria melainkan juga wanita yang siap ditugaskan di Papua. Mereka berasal dari berbagai instansi antara lain, guru, dokter, pegawai kantor pos, dan sebagainya. Sebelum dikirim ke Biak, para sukarelawan mendapat kursus selama 6 bulan di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Materi yang diterima adalah selain pembekalan semi-militer juga mengenai budaya masyarakat Papua. Menurut A.F.Manja (wawancara, Manja, Juni 2019), salah satu sukarelawan gelombang pertama yang menginjak Biak pada 1962 (asal Dobo, Provinsi Maluku), Presiden Soekarno lewat pembinaan di Kelapa Dua menyatakan bahwa “harus mengajar orang Papua sebagai tanggung jawab moral manusia”.

Para sukarelawan ini juga diingatkan untuk dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan masyarakat di Biak. Menurut Manja (wawancara, Juni 2019), beberapa cara diajarkan selama pembekalan di Depok. Yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di tengah masyarakat antara lain adalah: “pertama, buka mata selebar-lebarnya, buka telinga selebar-lebarnya dan tutup mulut serapat-rapatnya.”

Setiap minggu para sukarelawan ini harus melapor semua kegiatan yang mereka peroleh di lapangan dan melaporkan pada pejabat perwakilan di Biak setiap hari Sabtu. Dengan laporan ini, semua informasi akan dikirim ke Jakarta sehingga pemerintah akan menganalisis dan membuat kebijakan selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai diharapkan, maka

akan dibahas secara khusus agar jangan sampai melakukan hal-hal yang menentang masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa sukarelawan yang tiba di Biak pada awal 1963 antara lain, Manja, Jena (perempuan asal Jawa Timur), Jon Tirayoh (berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara), menunjukkan bahwa umumnya kehadiran para sukarelawan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Biak.

Manja adalah satu dari dua puluh sukarelawan asal propinsi Maluku yang menjadi angkatan pertama yang ditugaskan sebagai guru di Biak. Manja bersama rombongan pertama berangkat dari Jakarta menuju Jayapura kemudian tiba di Biak pada 7 Desember 1962. Selain Manja, ada juga S. Eluwajaan, J. Kuhon, M. Marthen. Mereka adalah rombongan pertama asal Maluku yang ditugaskan di Biak. Sementara itu, Jon Tirayoh asal Sulawesi Utara adalah salah satu anggota sukarelawan dari 34 orang Indonesia lainnya yang diterjunkan di Papua. Tirayoh (wawancara, Juli 2019) lahir di Jakarta dan tiba di Biak pada Februari 1963. Dia berprofesi sebagai guru bahasa Inggris yang ditugaskan di SMP YPK Biak. Tirayoh menyatakan bahwa tidak banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya pada waktu di Biak dan daerah di sekitar Biak, termasuk di Serui. Ketika ditugaskan, Tirayoh sering menggunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan olah raga dan seni suara demi menarik dukungan masyarakat Biak dan Serui.

Biak pada masa itu merupakan salah satu daerah di Papua dipersiapkan untuk memenangkan Pepera. Maka, pada waktu kunjungan Rolz Bennet 26 Mei 1964, kota Biak disiapkan dan tangsi polisi diduduki tentara yang bertugas demi menjaga ketertiban. Orang-orang Papua ditempatkan di sepanjang jalan dengan spanduk-spanduk antara lain, “kami mendahulukan makanan Indonesia daripada dasi dan bir”. Pada saat itu, pertemuan yang diadakan pemerintah dengan Rolz Bennet juga dihadiri oleh orang Papua. Pada kesempatan itu, pendeta Alex Prawar membacakan pidato yang disodorkan kepadanya. Dia mengumandangkan pujian bagi Indonesia. Sementara itu, orang Papua yang hadir menunjukkan ketidaksetujuan dengan isi pidato Prawar (Drooglever, 2009: 657).

Harus diakui bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia di Biak membuka pengalaman baru dalam perjalanan orang Biak sebagai bagian dari Indonesia. Respons orang Biak terhadap kebijakan pemerintah Indonesia sejak 1962 sangat dipengaruhi oleh peran para elite Biak itu sendiri. Menurut Weyai (wawancara, Juni 2019), masyarakat Biak selama itu mengikuti saja semua yang dihimbau oleh pemerintah. Banyak orang Biak mendapat jabatan sebagai staf di berbagai dinas. Sementara itu, masyarakat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah memilih melarikan diri ke hutan. Pernyataan Weyai ini didukung oleh kajian Djopari (1993:114) yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 1968 terjadi pemberontakan di Biak Utara yang dipimpin oleh Jan Pieter Karma yang menyerang pos ABRI di Korem serta beberapa pos lainnya di wilayah Biak Utara. Pemberontakan dilanjutkan oleh Melkianus Awom pada 1969.

## **PENUTUP**

Nasionalisme Indonesia sudah merupakan harga mati didasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan batasan wilayah pada rapat PPKI 18 Agustus 1945. Peristiwa ini mengandung makna bahwa semua penduduk yang berada di bekas wilayah Pemerintahan Hindia Belanda adalah milik NKRI, sehingga dengan sendirinya semua penduduk yang ada di bekas wilayah ini harus memiliki nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak membatasi diri hanya ras tertentu, tetapi membuka diri untuk semua suku, agama dan ras. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan para nasionalis Indonesia di Papua, khususnya di Biak sejak 1963 hingga 1969, adalah sesuai isi Persetujuan New York, yakni Pepera harus dimenangkan oleh Indonesia. Untuk memperkuat nasionalisme Indonesia, pemerintah pusat terus melakukan beberapa kegiatan demi memenangkan Pepera. Kegiatan tersebut antara lain berupa pengiriman para sukarelawan dari berbagai bidang ke Papua, termasuk di Biak sejak awal 1963. Di samping itu, diadakan pengiriman tokoh agama, suku, pemuda, perempuan, pendidikan, pelajar dan mahasiswa ke beberapa kota besar di luar Papua. Kegiatan penting lainnya adalah diadakan pula musyawarah besar rakyat

Papua di Jayapura yang disertai dengan ikrar rakyat Papua untuk setia pada NKRI melalui Piagam Kotabaru di Jayapura pada 1963.

Selama periode 1963 hingga 1969, upaya yang dilakukan pemerintah pusat memang sepintas dianggap terencana dan persiapan yang matang melalui jalur pendidikan formal dan nonformal serta pertemuan, kunjungan, dan himbauan. Namun, kenyataannya proses keindonesiaan yang berlangsung pada masa itu lebih berada pada proses mengindoktrinasi. Memang dapat dikatakan bahwa nilai-nilai keindonesiaan di Biak sedang bertumbuh, namun tidak melalui perencanaan yang matang dan proses yang wajar. Hal ini dapat terlihat ketika menjelang Pepera, aksi perlawanan terhadap pemerintah terus berlangsung sementara banyak tokoh Papua yang sebelumnya mendukung Indonesia akhirnya menjadi anti-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa respon rakyat di Biak sangat lemah.

Umumnya, pencetus keindonesiaan di Biak datang dari luar Papua. Maka, sekalipun bibit keindonesiaan yang dibawa antara lain oleh Lukas Rumkorem dan Frans Kaisiepo dapat memotivasi beberapa elit Biak lainnya, nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di hati orang Papua di Biak mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Hal itu bukan hanya karena orang Papua tidak pernah mengalami tahapan penindasan, seperti yang terjadi di luar Papua. Pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang ada di Papua yang sama-sama juga masih dalam tahap mendalami keindonesiaan. Dengan demikian, walaupun peristiwa dikumandangkan Trikora pada Desember 1961 berhasil membangun semangat menggelora dari rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua untuk mengusir Belanda di Papua, kesadaran kepapuaan orang Papua termasuk di Biak tidak semakin punah/lemah. Bila demikian kenyataannya, nasionalisme keindonesiaan di Biak perlu dikaitkan dengan pemikiran Matindas (2010). Menurut Matindas, paham nasionalisme harus berhenti dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat dibesar-besarkannya ideologi nasionalisme tersebut menjadi berhala semu. Paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika

yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan yang penting dirasakan sebagai api emosi yang besar membakar semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat berfungsi sebenar-benarnya.

Matindas juga menandakan bahwa nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran (Matindas, 2010: 21- 22). Sementara Hans Kohn (dalam Benni E. Matindas, 2010: 22)), menyatakan bahwa nasionalisme adalah peristiwa historis dan hanya gejala historis. Nasionalisme bukan berakar pada sesuatu yang universal dan selalu valid. Maka, nasionalisme tidak bisa dijadikan dasar negara yang objektif. Nasionalisme hanya ditentukan oleh variabel yang banyak dan dapat berubah-ubah yakni ide-ide politik yang bermunculan dan susunan masyarakat dari pelbagai negeri yang serba berbeda. Pemikiran Matindas dan Hans Kohn di atas ini sangat penting agar tidak ada generalisasi dalam melihat pertumbuhan nasionalisme di Indonesia, termasuk di Biak.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Antoh Demmy. (2007). *Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua*, Jakarta.
- Andaya, L.Y. (1993). *The World of Maluku*. Hawaii.
- Bruijn, V.J.van der. (1978). *Verdwenen Volk*, Uniepers, Amsterdam.
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption*, East-West center, Washington.
- Drooglever Pieter, J. (2010), *Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djopari, John. R.G. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta PT. Gramedia.
- Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, (1961) *Tinjauan Situasi Irian Barat*, Jakarta.
- Meteray, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Kompas: Jakarta.
- Pigay, D.N. (2000). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* Jakarta.
- Widjojo, S.Muridan. Ed. (2009). *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta.

### Arsip

- Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat Inggamer di Biak, 14-12-49. kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49.*
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 va n de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr[56 Title *Biak Affaire Date 1948.*
- NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr]56 Title *Biak* .
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 va n de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr[56 Title *Biak Affaire Date 1948.*
- NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr]56 Title *Biak* .
- NA. Rapportage Indonesia Invent ,777 Title *Oversicht en Ontwikkeling van den Toestand date[ December 1947- December 1948.*
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 van de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. *Jaavers lag 1947 van de Residentie Nieuw Guinea, van Eechoud 23 April 1948.*
- NA. *Jaarsverslag 1947 van de Residentie Nieuw Guinea, van Eechoud 23 April 1948.*

### Disertasi & Skripsi

- Meteray Bernarda, *Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua Dan Indonesia Di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925-1962*, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Meteray Bernarda, *Perjuangan Rakyat Biak 1945-1962 (Studi sejarah Sosial Politik)*, Skripsi, UNS, Surakarta, 1987.

### Makalah, Jurnal & Hasil Penelitian

- Fred Keith Hutubessy<sup>2</sup> dan Jacob Daan Engel. (2019). *Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua*”, *Pemikiran Sosiologi*, Volume 6 No. 1, Januari 2019, 77-91.
- Meteray Bernarda.(2014). *Kontestasi nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru, Makalah*, Dalam Seminar Akhir Tahun dengan tema: “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik”, LIPI Jakarta 18 Desember 2014.
- Meteray Bernarda, Wabiser Y.D, dan Timisela Marthen(2018), *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian*, UNCEN
- Meteray Bernarda dan Jamal Ode (2018), *Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara*

Orang Papua di Jayapura 1945-1949, *hasil penelitian, UNCEN*

Lumintang Onie Mentang dan Meteray Bernarda (2017), *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1963-1965, hasil penelitian, UNCEN*

Pemberontakan Bersenjata 14 Maret 1948 di Biak, 1983. *Makalah*, KNPI Dati II Teluk Cenderawasih,

**Surat Kabar**

The New York Times, 1 January 1961.

**Website**

Masalah Papua Bukan Hanya Ekonomi, Butuh Dialog Sebagai Solusi. (2018, 21 Agustus). Diakses dari <https://www.tifafoundation.org/masalah-Papua-bukan-hanya-ekonomi-butuh-dialog>

**Wawancara.**

D. Manja, 4 Juni 2019

Jon Tirayoh, 6 Juni 2019

Joseph. Weyai, 7 Juni 2019

Jena, 4 Juni 2019

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

